

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KUALITAS LINGKUNGAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI PULAU DOMPAK, KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Roby Cahyadi¹, Yuanita FD Sidabutar², Alpano Priyandes

¹Fakultas Teknik, Universitas Batam

Program Studi Perencanaan Wilayah

Email: 102623001@univbatam.ac.id

uploaded:11/03/2026

revised:11/03/2026

accepted:11/03/2026

published:11/03/2026

ABSTRAK

Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi berdasarkan penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Penentuan lokasi pusat pemerintahan di Kota Tanjungpinang merupakan hasil kesepakatan bersama serta penerbitan surat kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 yang menetapkan lokasi perkantoran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada di Pulau Dompak. Secara administrasi Pulau Dompak masuk wilayah Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Kualitas lingkungan dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Ketersediaan prasarana yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis SWOT dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan di Pulau Dompak sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau serta bagaimana strategi pengembangannya. Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif dan teknik analisis yang digunakan adalah SWOT. Hasil penelitian memperoleh rumusan strategi penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas lingkungan di Pulau Dompak yaitu pengembangan jaringan SPAM, peningkatan kapasitas drainase, penyediaan prasarana penerangan jalan, penyediaan RTH, pemeliharaan infrastruktur fisik yang telah terbangun, pemanfaatan lahan yang masih kosong untuk pembangunan lahan parkir, kerjasama dengan pihak lain dan penguatan kelembagaan pengelola kawasan.

Kata Kunci: Pulau Dompak, Sarana dan Prasarana, Kualitas Lingkungan

ABSTRACT

Tanjungpinang City is the capital of the Province based on the stipulation of Law Number 25 of 2002. Determining the location of the center of government in Tanjungpinang City is the result of mutual understanding and the issuance of a letter of agreement between the Riau Islands Provincial Government and the Regional People's Representative Council (DPRD) of Riau Islands Province in 2007 which determines The location of the Riau Islands Province government offices is on Dompak Island. Administratively, Dompak Island is part of Dompak Village, Bukit Bestari District, Tanjungpinang City. Environmental quality can be interpreted as an environmental condition that can provide optimal carrying capacity for human survival in an area. The availability of quality infrastructure can improve environmental quality. The aim of the research is to find out how to apply SWOT analysis in providing regional facilities and infrastructure to optimize environmental quality on Dompak Island as the Central Government Area of the Riau Islands Province and what the development strategy is. The research method is a qualitative method using a descriptive approach and the analysis technique used is SWOT. The results of the research obtained the formulation of a strategy for providing facilities and infrastructure to improve environmental quality on Dompak Island, namely developing the SPAM network, increasing drainage capacity, providing street lighting infrastructure, providing green open space, maintaining physical infrastructure that has been built, utilizing empty land for the construction of parking lots, cooperation with other parties and strengthening regional management institutions.

I. PENDAHULUAN

Pulau Dompak ditetapkan sebagai kawasan pusat pemerintahan provinsi berdasarkan nota kesepahaman (MOU) dan surat kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 yang telah ditetapkan melalui Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang dinamakan “Istana kota Piring Pulau Dompak” ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, sehingga wilayah Pulau Dompak penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Sarana dan prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ketersediaan prasarana yang berkualitas seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase, demikian juga penyediaan permukiman yang layak huni serta prasarana pengendalian banjir dan prasarana jalan yang terpelihara baik akan meningkatkan kualitas lingkungan (Nugroho, 2016).

Sejak kurun waktu Tahun 2008 hingga saat ini, pembangunan fisik berupa sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan telah dilaksanakan. Tahapan fisik tersebut dimulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, permukiman, gedung perkantoran hingga lanskap kawasan.

II. PERMASALAHAN

Sebagai pusat pemerintahan, kualitas lingkungan yang baik perlu diwujudkan. Masih adanya konflik pertanahan, kurangnya ketersediaan air bersih, masih terjadinya banjir, terjadinya degradasi lingkungan akibat kegiatan pembangunan di Pulau Dompak serta adanya kegiatan pembangunan yang belum sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan

merupakan beberapa kendala yang ada dalam meningkatkan kualitas lingkungan di Pulau Dompak. Untuk itu diperlukan peran serta upaya segenap pihak tidak hanya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kawasan sebagai pusat pemerintahan agar sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian Purwasih, dkk (2021) mengenai nilai karakteristik Pulau Dompak sebagai citra pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang mengemukakan bahwa Pulau Dompak dapat menjadi komoditi ekonomi mikro bagi warga setempat dengan mempertimbangkan bahwa Pulau Dompak memiliki sarana yang memadai, ada Universitas, Masjid Raya, Pantai, situs sejarah, spot-spot menarik sesuai dengan budaya melayu. Penelitian yang dilakukan oleh Sidabutar dan Indra (2021) mengenai kajian potensi perencanaan wilayah Kota Binjai Sumatera Utara, diperoleh konsep pemikiran untuk bagaimana cara meningkatkan nilai perekonomian Kota Binjai.

Massikki (2005) dalam penelitiannya mengenai analisis ketersediaan sarana dan prasarana pada lingkungan permukiman menunjukkan bahwa Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman padat di kawasan pusat kota adalah melalui optimalisasi fungsi Sarana dan Prasarana lingkungannya yang akan berdampak pada aspek ekonomi, dimana semakin dekat suatu kelompok masyarakat penghuni terhadap sarana dan prasarana (*Infra Structure*) maka semakin sering mereka mendatangi sarana dan prasarana tersebut. Penelitian yang dilakukan Rohmadiani, dkk (2017) mengenai strategi pengembangan wilayah hinterland Kabupaten Gresik dengan teknik analisis SWOT menghasilkan beberapa strategi pengembangan wilayah *hiterland* Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik sebagai lokasi studi kasus.

Dari uraian permasalahan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan analisis SWOT dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan di Pulau Dompok sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana strategi dalam peningkatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan di Pulau Dompok sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau?

Dari rumusan masalah, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis SWOT dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan di Pulau Dompok sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi dalam peningkatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan di Pulau Dompok sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

III. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif. Metode ini melukiskan suatu keadaan obyektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang diringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut (Nawawi dan Martini, 1994). Literatur yang digunakan diambil dari beberapa peraturan yang terkait dan penelitian yang mendukung dalam tulisan ini. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis SWOT dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Pulau Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

IV. PEMBAHASAN

1. Kondisi wilayah

Pada masa Kerajaan Riau Lingga, Kampung Dompok Lama merupakan tempat persembunyian perompak yang berasal dari sejumlah etnis yakni Tionghoa, Bugis, Melayu, Thailand hingga Jawa. Ketua Perompak yang merupakan etnis Tionghoa menamakan wilayah kampung Dompok lama yang saat itu belum bernama dengan sebutan “Kampung Lompak” namun seiring dengan berjalannya waktu Kerajaan Riau-Lingga berhasil membasmi dan mengusir para perompak yang selanjutnya wilayah tersebut dihuni oleh orang Melayu dan mengubah nama wilayah dari “Kampung Lompak” menjadi “Kampung Dompok”. Penduduk asli Dompok adalah orang Melayu yang berasal dari Pulau Penyengat dan pulau-pulau di sekitar Pulau Bintan dengan daerah pertama yang dihuni adalah Kampung Lama. Dalam perkembangannya, penduduk menyebar ke Tanjung Siambang, Dompok Seberang, Dompok Laut, dan Sei Jang Dompok Daratan yang saat ini telah berkembang menjadi salah satu kawasan perkampungan di wilayah Kota Tanjungpinang.

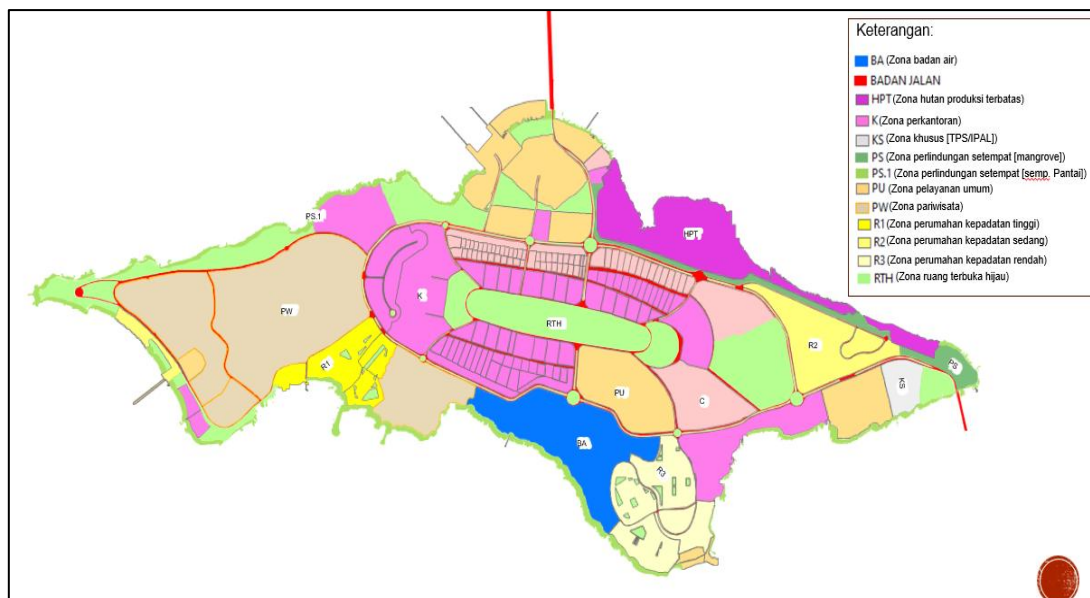
Pulau Dompok terletak pada 0° 51' LU-0° 59' LU dan 104° 23' BT-104° 34' BT. Secara administrasi, Pulau Dompok merupakan bagian dari Wilayah Kota Tanjungpinang yaitu masuk dalam Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan luas wilayah sebesar 997 Ha (sesuai MOU) namun berdasarkan Kantor Pertanahan/BPN luas Pulau Dompok kurang lebih 1.050 Ha.



Gambar 1. Peta lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak.

Secara lebih detail, peruntukan ruang di Pulau Dompak telah diatur di dalam Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 yang memuat rencana struktur ruang antara berupa rencana jaringan transportasi (jaringan jalan, pelabuhan), jaringan ketenagalistrikan, telekomunikasi, air bersih dan tempat pengelolaan sampah. Sementara dalam rencana pola ruang telah dialokasikan peruntukan ruang

meliputi badan air, badan jalan, hutan produksi terbatas (HPK), pariwisata, RTH kota (jalur hijau, taman kota, pemakaman), perumahan (perumahan kepadatan rendah hingga tinggi), perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, sarana pelayanan umum (sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, olah raga, peribadatan) serta kawasan khusus (TPS dan IPAL).



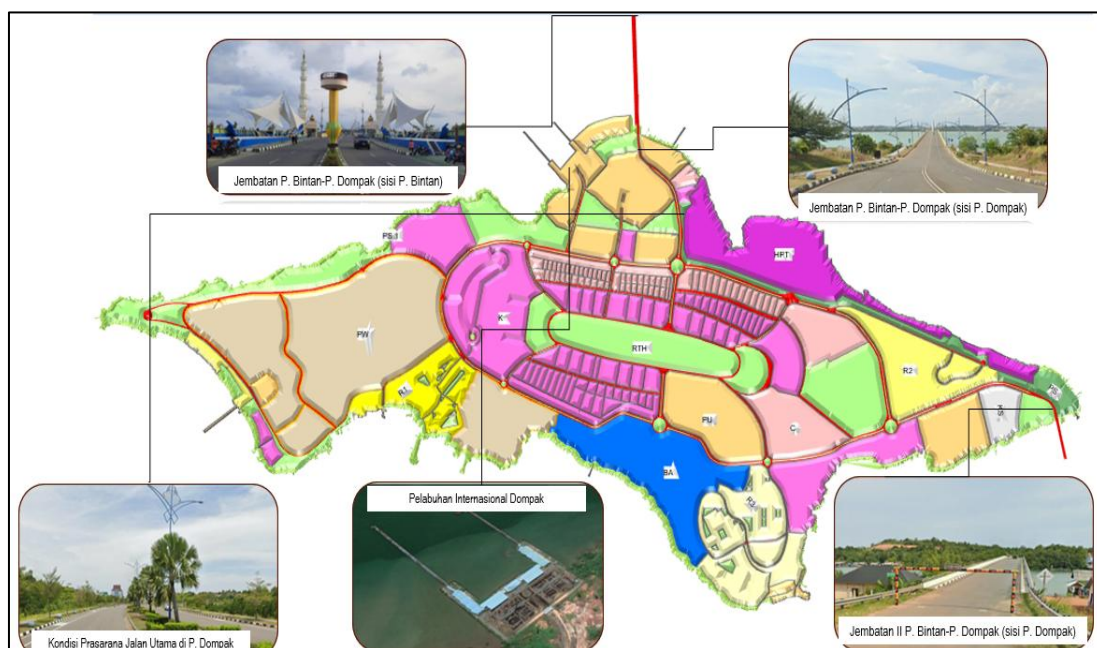
Gambar 2. Peruntukan ruang di Pulau Dompak
 Sumber : Perda RDTR Kota Tanjungpinang

2. Potensi

Potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (Majdi, 2007). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Berdasarkan definisi tersebut potensi wilayah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia di suatu wilayah yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan penduduk pada wilayah yang bersangkutan atau wilayah lainnya.

Pulau Dompok sebagai kawasan pusat pelayanan kegiatan pemerintahan menjadikan kawasan ini sebagai tujuan dari berbagai pihak dalam urusan pemerintahan tingkat provinsi. Pulau Dompok terletak cukup dekat kawasan pariwisata internasional Lagoi yang terletak di Pulau Bintan Kabupaten Bintan serta cukup dekat dengan beberapa negara tetangga sehingga dapat menjadi alternatif destinasi wisata baru di Kota Tanjungpinang.

Pembangunan infrastruktur yang telah dimulai sejak awal pembangunan pada Tahun 2018 telah berhasil menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di Kawasan pusat pemerintahan. Saat ini telah terbangun prasarana transportasi seperti jembatan yang menghubungkan Pulau Dompok dan Pulau Bintan, jalan yang dilengkapi dengan fasilitas trotoar serta pelabuhan yang mendukung aksesibilitas dan pergerakan masyarakat menuju Pulau Dompok.

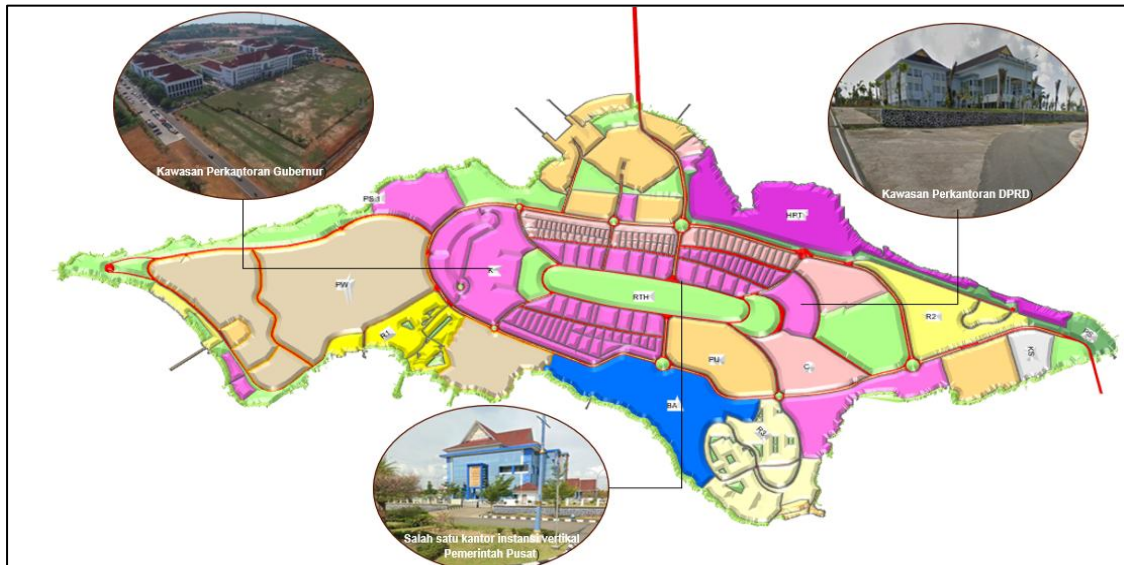


Gambar 3. Gambaran kondisi sarana transportasi di Pulau Dompok

Sebagai kawasan pusat pemerintahan telah terbangun prasarana infrastruktur berupa gedung perkantoran antara lain kantor gubernur,

kantor DPRD, kantor dinas/instansi lainnya. Pengembangan pembangunan beberapa fasilitas gedung perkantoran dari berbagai instansi juga

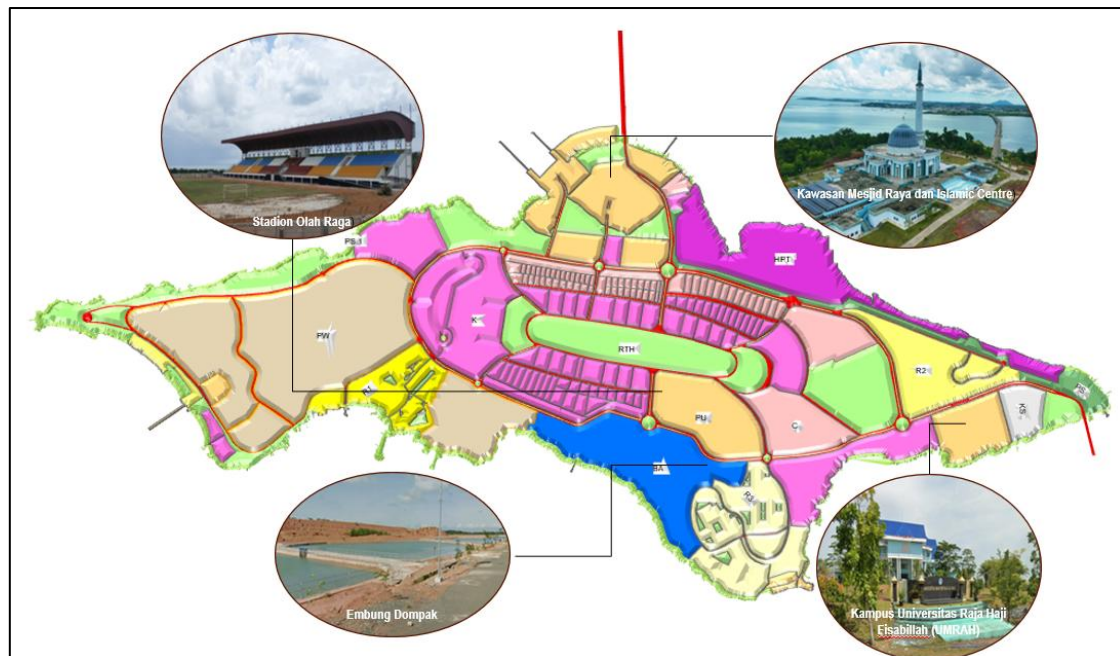
hingga kini sedang berlangsung proses pembangunan fisiknya.



Gambar 4. Gambaran kondisi ketersediaan sarana perkantoran

Untuk menunjang kegiatan masyarakat, telah tersedia pula prasarana fasilitas umum seperti stadion olah raga, prasarana peribadatan berupa mesjid raya, prasarana

pendidikan, dan ketersediaan embung sebagai penyedia air baku.



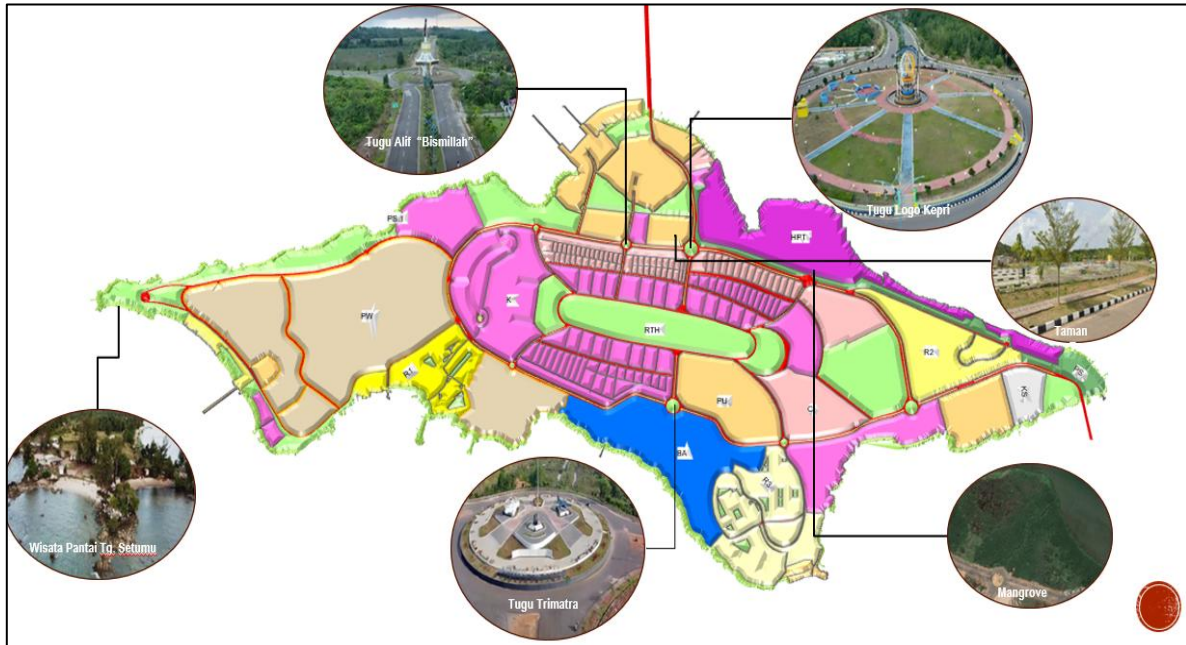
Gambar 5. Gambaran kondisi ketersediaan fasilitas umum

Sementara itu, untuk menunjang perwujudan Pulau Dompok sebagai destinasi

wisata, tersedia obyek wisata alam berupa pantai, mangrove serta telah terbangun

beberapa tugu dan taman sebagai *land mark* kawasan. Disamping itu terdapat destinasi wisata kuliner, yang tersebar di seluruh penjuru pulau. Ketersediaan lahan kosong yang masih

banyak serta jumlah penduduk yang relatif masih sedikit dapat meminimalisir konflik sosial dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan wilayah.



Gambar 6. Gambaran kondisi potensi wisata

3. Kendala

Dalam pengembangan sarana dan prasarana yang berkualitas di kawasan Pulau Dompak masih dihadapkan dengan beberapa kendala antara lain:

1. Masih adanya konflik pertanahan;
2. Belum mencukupinya ketersediaan air bersih akibat potensi ketersediaan air dangkal yang minim;
3. Masih terjadinya banjir pada saat hujan lebat ekstrim akibat belum optimalnya sistem drainase;
4. Belum optimalnya ketersediaan lahan parkir di tempat-tempat umum dan kawasan perkantoran;
5. Masih belum meratanya ketersediaan lampu penerangan di beberapa ruas jalan umum;
6. Keterbatasan anggaran pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun di Pulau Dompak;

7. Kurangnya sarana transportasi umum yang terintegrasi antara pusat kota Tanjungpinang dan Kawasan Perkantoran Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak;
8. Kurangnya ketersediaan fasilitas penunjang pariwisata seperti area komersial, tempat penginapan (wisma/hotel) dan lain sebagainya;
9. Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan Pulau Dompak yang saat ini berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada salah satu OPD teknis;
10. Kurangnya promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan pembangunan infrastruktur di Pulau Dompak.

4. Analisis SWOT

Menurut Freddy (2013), Analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan

(*Strength*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Sedangkan Kotler (2009) mendefinisikan analisis SWOT merupakan evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT merupakan

suatu metode untuk menggambarkan dan membandingkan bagaimana kondisi dan cara untuk mengevaluasi suatu masalah berdasarkan faktor eksternal dan internal, yaitu *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat*. Analisis faktor internal dan eksternal dalam pengembangan infrastruktur fisik untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan dijabarkan dalam tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1. Analisis faktor strategis internal

No.	Faktor	Bobot	Nilai	Bobot X Nilai
Kekuatan				
1.	Pulau dampak terletak pada posisi yang strategis, dekat dengan destinasi wisata internasional “Lagoi” di Kabupaten Bintan dan dekat beberapa negara tetangga (Malaysia dan Singapura)	0,3	3	0,9
2.	Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai	0,2	4	0,8
3.	Terdapat potensi alam berupa pantai dan hutan mangrove serta bangunan sebagai “ <i>land mark</i> ” untuk pengembangan pariwisata	0,2	4	0,8
4.	Tersedianya fasilitas umum meliputi prasaran pendidikan (kampus UMRAH), prasarana peribadatan serta olah raga	0,2	3	0,6
5.	Tersedianya obyek wisata kuliner	0,1	3	0,3
Jumlah		1		3,4
Kelemahan				
1.	Ketersediaan air bersih yang belum mencukupi akibat potensi ketersediaan air dangkal yang minim di Pulau Dompok.	0,2	4	0,8
2.	Masih terjadinya banjir pada saat hujan lebat ekstrim akibat belum optimalnya sistem drainase.	0,1	3	0,3
3.	Masih belum meratanya ketersediaan lampu penerangan di beberapa ruas jalan umum	0,1	3	0,3
4.	Belum optimalnya ketersediaan lahan parkir di tempat-tempat umum dan kawasan perkantoran	0,1	3	0,3
5.	Keterbatasan anggaran pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun di Pulau Dompok	0,2	4	0,8
6.	Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan Pulau Dompok yang saat ini berupa UPT pada salah satu OPD teknis	0,1	3	0,3
7.	Kurangnya promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan pembangunan infrastruktur di Pulau Dompok.	0,2	4	0,8
Jumlah		1		3,6

Tabel 2. Analisis faktor strategis eksternal

No.	Faktor	Bobot	Nilai	Bobot X Nilai
Peluang				
1.	Dalam Rencana Tata Ruang, Pulau Dompak ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan, pusat pertumbuhan baru dan kegiatan kepariwisataan di provinsi sebagai icon daerah dengan nuansa budaya melayu.	0,6	4	2,4
2.	Masih banyak terdapat lahan yang kosong serta jumlah penduduk yang relatif masih sedikit sehingga memudahkan dalam pengembangan kawasan di masa mendatang seperti pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perdagangan dan jasa serta pariwisata.	0,4	4	1,6
Jumlah		1		4
Ancaman				
1.	Masih adanya konflik pertanahan di Pulau Dompak	0,2	3	0,6
2.	Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	0,3	3	0,9
3.	Sebagai wilayah pesisir berpotensi terjadi bencana seperti cuaca ekstrim, abrasi dan banjir	0,3	3	0,9
4.	Belum adanya rute transportasi umum yang terintegrasi antara kawasan pusat pemerintahan dan Pusat Kota Tanjungpinang.	0,2	3	0,6
Jumlah		1		3

Pada tabel 1 dan tabel 2, pemberian nilai bobot berdasarkan derajat kepentingan dari masing-masing faktor internal dan eksternal, sedangkan pemberian nilai berdasarkan skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena (Sugiyono, 2018:152). Kriteria pemberian nilai berdasarkan skala likert dalam penelitian ini meliputi: 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (cukup); 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju). Hasil perhitungan diperoleh nilai total sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Internal} &= \text{Kekuatan} - \text{Kelemahan} \\ &= 3,4 - 3,6 = -0,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Eksternal} &= \text{Peluang} - \text{Ancaman} \\ &= 4 - 3 = 1 \end{aligned}$$

Berdasarkan kondisi (-0,2 ; 1) maka masuk dalam kuadran II sehingga strategi yang dilakukan adalah strategi (WO) yaitu menciptakan rencana yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang sehingga strategi kebijakan untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan di Pulau Dompak dari segi aspek fisik dijabarkan pada tabel 3.

Tabel 3. Strategi Pengembangan Pulau Dompak

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau dompak terletak pada posisi yang strategis, dekat dengan destinasi wisata internasional “Lagoi” di Kabupaten Bintan dan dekat beberapa negara tetangga (Malaysia dan Singapura). 2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai. 3. Masih belum meratanya ketersediaan sarana lampu penerangan di beberapa ruas jalan umum. 4. Tersedianya fasilitas umum meliputi prasaran pendidikan (kampus UMRAH), prasarana peribadatan serta olah raga. 5. Tersedianya obyek wisata kuliner 	<p style="text-align: center;">W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan air bersih yang belum mencukupi akibat potensi ketersediaan air dangkal yang minim di Pulau Dompak. 2. Masih terjadinya banjir pada saat hujan lebat ekstrim akibat belum optimalnya sistem drainase. 3. Masih belum meratanya ketersediaan lampu penerangan di beberapa ruas jalan umum. 4. Belum optimalnya ketersediaan lahan parkir di tempat-tempat umum dan kawasan perkantoran. 5. Keterbatasan anggaran pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun di Pulau Dompak. 6. Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan Pulau Dompak yang saat ini berupa UPT pada salah satu OPD teknis. 7. Kurangnya promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan pembangunan infrastruktur di Pulau Dompak.
<p style="text-align: center;">O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Rencana Tata Ruang, Pulau Dompak ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan, pusat pertumbuhan baru dan kegiatan kepariwisataan di provinsi sebagai icon daerah dengan nuansa budaya melayu. 2. Masih banyak terdapat lahan yang kosong serta jumlah penduduk yang relatif masih sedikit sehingga memudahkan dalam pengembangan kawasan di masa mendatang seperti pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perdagangan dan jasa serta pariwisata 	<p style="text-align: center;">I</p>	<p style="text-align: center;">Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sumber air baku dari luar Pulau Dompak sesuai dengan rencana tata ruang. 2. Peningkatan kapasitas drainase terutama pada titik-titik rawan banjir. 3. Penyediaan prasarana lampu penerangan jalan umum sesuai dengan standar kawasan sebagai pusat pemerintahan. 4. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) 5. Pemeliharaan infrastruktur fisik yang telah terbangun. 6. Pemanfaatan lahan yang masih kosong untuk pembangunan lahan parkir. 7. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain termasuk swasta dalam pengembangan kawasan terutama sektor perdagangan, jasa dan pariwisata untuk mengoptimalkan ketersediaan lahan yang ada sesuai dengan rencana tata ruang. 8. Penguatan kelembagaan pengelola infrastruktur kawasan
<p style="text-align: center;">T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya konflik pertanahan di Pulau Dompak. 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 3. Sebagai wilayah pesisir berpotensi terjadi bencana seperti cuaca ekstrim, abrasi dan banjir. 4. Belum adanya rute transportasi umum yang terintegrasi antara 	<p style="text-align: center;">III</p>	<p style="text-align: center;">IV</p>

kawasan pusat pemerintahan dan Pusat Kota Tanjungpinang.		
----------------------------------------------------------	--	--

V. KESIMPULAN

Dalam rencana tata ruang, Pulau Dompok telah ditetapkan sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sehingga pengembangan kawasan Pulau Dompok menjadi salah satu prioritas pemerintah. Ketersediaan prasarana yang berkualitas seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase, prasarana permukiman, jalan dan pengendalian banjir yang terpelihara dengan baik akan dapat meningkatkan kualitas lingkungan di Pulau Dompok.

Berdasarkan analisa SWOT yang menganalisis faktor internal dan eksternal dalam pengembangan infrastruktur fisik untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan di Pulau Dompok berada pada kuadran II sehingga digunakan strategi (WO) yaitu menciptakan rencana yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dengan strategi meliputi pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM), peningkatan kapasitas drainase, penyediaan prasarana lampu penerangan jalan, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), pemeliharaan infrastruktur fisik yang telah terbangun, pemanfaatan lahan yang masih kosong untuk pembangunan lahan parkir, kerjasama dengan pihak lain termasuk swasta dan penguatan kelembagaan pengelola kawasan.

VI. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan disarankan sebagai berikut:

1. Agar kualitas lingkungan dapat terjaga secara optimal, pembangunan sarana dan prasarana kawasan di masa mendatang dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
2. Pemeliharaan infrastruktur fisik yang telah terbangun perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas infrastruktur

dapat berfungsi optimal sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan.

3. Perlu dilakukan upaya yang intensif untuk mewujudkan kerjasama dengan pihak lain, termasuk pihak swasta dalam mengoptimalkan potensi yang ada di Pulau Dompok sebagai kawasan pusat pemerintahan provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kota Tanjungpinang. 2018. *Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur Dan Bukit Bestari Tahun 2018-2038*. Pemerintah Kota Tanjungpinang: Tanjungpinang.
- Kotler, Philip dan Keller Kevin Lane. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kedua belas. Jilid 2. PT. Indeks.
- Massikki, M. N. 2005. "Analisis Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pada Lingkungan Permukiman". *Majalah Ilmiah*, 7(3), 148-157.
- Nawawi, Hadari, Mimi Martini, 1994, "Penelitian Terapan", Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Nugroho, Hernawan. 2016. "Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan", <https://bappeda.jogjaprovo.go.id/artikel/detail/52-strategi-penyelenggaraan-infrastruktur-bidang-pu-untuk-meningkatkan-kualitas-lingkungan>, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 22.15.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang*

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia. 2007.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang. Lembaran Negara RI Tahun
2007, No. 68. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Provinsi Kepulauan Riau. 2017. *Peraturan*
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor
1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2037. Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017,
No.1. Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau: Tanjungpinang

Purwasih, H. D., Wartono, Edi Indera. 2021.”
Nilai Karakteristik Pulau Dompok
Sebagai Citra Pusat Pemerintahan
Provinsi Kepulauan Riau di Kota
Tanjungpinang”. *Jurnal Potensi Program*
Studi Magister Perencanaan Wilayah
Universitas Batam, 1(2), 40-45.

Rangkuti, Freddy. 2013. *Analisis SWOT: Teknik*
Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.

Rohmadiani. L. D., Frederikus RB Dede. 2017.
“Strategi Pengembangan Wilayah
Hinterland Kabupaten Gresik”. *Jurnal*
Teknik Waktu, 15(2), 50-56.

Saragih, A. R., Ida Bagus Made Astawa, I Made
Sarmita. “Diversifikasi Potensi dan
Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Taman Kota di Wilayah Kota Singaraja”.
Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha,
9(1), 44-55.

Sidabutar, Yuanita F. D., Edi Indera. 2021.
“Kajian Potensi Perencanaan Wilayah
Kota Binjai Sumatera Utara”. *Jurnal*
Potensi Program Studi Magister
Perencanaan Wilayah Universitas
Batam, 1(1), 36-49.